

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI INFORMASI ELEKTRONIK PADA DOKUMEN ELEKTRONIK SERTA HASIL CETAKNYA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA*

Nur Laili Isma** dan Arima Koyimatun***

Program Studi Pascasarjana, Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Jalan Sosio Justisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Abstract

This research studies on the strength of electronic documents and its printed copy as evidence in criminal proceedings. The questions presented are: How is the position of electronic evidences and documents, as well as its printed copies, in the evidentiary process of criminal proceedings? How is the strength of those said documents in the evidentiary process? This research is a juridical normative research. The research shows that electronic evidences and documents as well as their printed copies can be categorized as expansion of letter evidences or directives based on Article 184 of KUHAP. Criminal procedural law does not have hierarchy of evidences, however such documents need to be duly considered.

Keywords: evidences, electronic documents, criminal procedural law.

Intisari

Penelitian ini membahas tentang kekuatan pembuktian alat bukti informasi elektronik pada dokumen elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian tindak pidana. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah Bagaimana kedudukan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian tindak pidana? Bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian tindak pidana? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kedudukan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dapat merupakan perluasan alat bukti surat maupun petunjuk berdasarkan 184 KUHAP. Dalam hukum acara pidana tidak mengenal adanya hierarki alat bukti. Akan tetapi pada perkembangannya alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik harus dipertimbangkan dalam membuat terang suatu perkara pidana.

Kata Kunci: alat bukti, dokumen elektronik, hukum acara pidana.

Pokok Muatan

A. Latar Belakang	110
B. Metode Penelitian	110
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	111
1. Kedudukan Alat Bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana	111
2. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik	112
D. Kesimpulan	113

* Hasil penelitian didanai Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum UGM.

** Alamat korespondensi: apirimayurista@gmail.com.

*** Alamat korespondensi: helmy.boemiya@gmail.com.

A. Latar Belakang

Banyak sekali dampak yang bisa dirasakan dengan adanya jejaring sosial ini, baik itu dampak positif misalnya mempermudah komunikasi masyarakat tanpa dibatasi waktu dan jarak, menjalin persahabatan, perhatian dan empati sesama pengguna serta memudahkan pengguna untuk saling bertukar informasi. Ataupun sebaliknya dampak negatif, sisi negatif dari jejaring sosial misalnya pertukaran data yang berbau pornografi dan pornoaksi, saling menghina dan mengejek serta masih banyak lagi. Sehingga kemajuan teknologi sangat potensial terhadap munculnya berbagai bentuk tindak pidana, internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai tindak pidana berbasis teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah *cybercrime*.¹

Perkembangan teknologi informasi melahirkan aturan baru di Indonesia, yaitu diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara umum, materi UU ITE dibagi menjadi dua bagian besar yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. UU ITE tersebut juga mengatur mengenai alat bukti baru sebagai perluasan dari alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Dalam Pasal 5 UU ITE berbunyi:²

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan isi Pasal 5 UU ITE di atas maka adanya alat bukti yang disebut dengan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bisa dengan mudah untuk membuktikan tindak pidana yang diatur dalam UU ITE karena alat bukti baru tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP mengatur alat bukti yang sah dalam acara pidana adalah sebagai berikut :

- (1) Keterangan Saksi
- (2) Keterangan Ahli
- (3) Surat
- (4) Petunjuk
- (5) Keterangan Terdakwa

Dengan pemaparan di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana”. Berdasarkan dari latar belakang pemikiran di atas, maka yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: (1) Bagaimana kedudukan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian tindak pidana? (2) Bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian tindak pidana?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian normatif. Dalam penelitian ini peneliti mengedepankan data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Meskipun pada dasarnya penelitian ini bersifat normatif, dalam prakteknya peneliti menyandarkan pada data primer yang peneliti dapatkan melalui wawancara. Wawancara dilakukan pada para narasumber untuk

¹ Ach. Tahir, 2010, *Cyber Crime (Akar Masala, Solusi, dan Penanggulangannya)*, Suka Press, Yogyakarta. hlm.3.

² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4847).

memperkuat data sekunder yang ada, terutama untuk mencermati apa yang terkandung dalam undang-undang. Narasumber dalam penelitian ini adalah dua orang pakar yaitu Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. selaku Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM dan Anugra Anditya, S.H., M.T. selaku Dosen Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum UGM. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kedudukan Alat Bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana

Dalam menjabarkan kedudukan alat bukti informasi elektronik berdasarkan Pasal 5 UU ITE, Penulis telah mengidentifikasi beberapa peraturan perundang-undangan hukum pidana yang menerangkan tentang alat bukti elektronik. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang.
- 4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 5) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 6) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan

Terorisme.

- 8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- 9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Berdasarkan sembilan (9) undang-undang di atas terdapat dua pandangan tentang alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik yaitu sebagai berikut: **Pandangan pertama**, adalah bahwa bukti elektronik itu masuk dalam pengkategorian bukti yang sudah ada, artinya tidak berdiri sendiri. Terlihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan mengkategorikan bahwa alat bukti elektronik yang dimana merupakan perluasan dari alat bukti surat sebagaimana dalam pasal 184 KUHP. Karena mengingat dokumen elektronik merupakan bagian dari dokumen perusahaan dan dokumen perusahaan dimaksud merupakan bagian dari alat bukti surat.³ Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan secara tegas alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah yang berupa petunjuk. Sebagaimana telah diterangkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. **Pandangan kedua**, menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri. Alat bukti elektronik merupakan yang terpisah dari alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 184 KUHP. Pengaturannya ditemukan dalam keempat peraturan terakhir yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan

³ Hasil Wawancara dengan Eddy O.S. Hiariej selaku Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada Hari Senin, Tanggal 17 April 2014.

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, berpendapat bahwa berdasarkan pasal 5 UU ITE bahwa alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Menurutnya tidak perlu lagi dipertentangkan apakah alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti surat ataupun alat bukti petunjuk karena pada dasarnya alat bukti informasi elektronik dan hasil cetaknya merupakan penambahan alat bukti baru selain yang ada dalam UU ITE.⁴ Jadi alat bukti dalam pembuktian perkara pidana saat ini terdiri dari lima (5) alat bukti yang diatur Pasal 184 KUHAP dan Pasal 5 UU ITE yaitu sebagai berikut: keterangan saksi, keterangan ahli, surat; petunjuk; keterangan terdakwa; dan informasi elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya.

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Anugrah untuk menentukan kedudukan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik harus ditelaah lebih jauh substansi atau isi dari alat bukti tersebut. Berdasarkan substansi tersebut alat bukti informasi elektronik bisa dikategorikan sebagai perluasan alat bukti surat dan alat bukti petunjuk. Dari dua pandangan yang berbeda di atas, peneliti cenderung sependapat dengan pandangan yang diberikan oleh Eddy O.S. Hiariej. Hal ini dikarenakan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik itu memiliki sifat yang berbeda dengan alat bukti yang telah ada dalam Pasal 184 KUHAP terutama jika melihat alat bukti informasi elektronik dan dokumen

elektronik sebagai perluasan dari alat bukti surat dan petunjuk. Hal ini karena surat yang dimaksud dalam KUHAP hanya surat secara konvensional. Sedangkan dokumen elektronik tidak hanya terbatas pada surat pada bentuk tulisan saja. Tapi juga suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Selanjutnya alasan mengapa alat bukti informasi elektronik tidak bisa dijadikan sebagai perluasan sumber perolehan alat bukti petunjuk karena mengingat untuk keberadaan alat bukti petunjuk itu digunakan pada setelah menghadirkan alat bukti lain. Padahal alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik untuk beberapa kasus pidana bisa menjadi alat bukti utama dan pertama dalam pembuktian terutama jika berkaitan dengan kejahatan dunia maya atau *cybercrime*.

2. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik

Dalam hukum acara pidana, kekuatan semua alat bukti pada hakikatnya sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki.⁵ Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Oleh karena itu, dalam hukum acara pidana terdapat bukti yang bersifat pelengkap. Pada dasarnya dalam pembuktian modern ada yang dikenal alat bukti universal. Salah satu alat bukti universal di dunia ini adalah dokumen. Dokumen itu tercakup dokumen elektronik jadi tidak hanya di dunia maya termasuk didalamnya hasil *print-out* merupakan dokumen. Alat bukti elektronik harus dilakukan verifikasi lebih lanjut mengenai alat bukti dokumen elektronik sama juga dengan verifikasi terhadap alat bukti surat. Ada tiga hal yang berkaitan dengan dokumen

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

sebagai alat bukti yaitu:⁶ terkait dengan keaslian dokumen tersebut atau originalitas; isi sebuah dokumen atau substansinya; dan mencari alat-alat bukti lain yang memperkuat alat bukti dokumen elektronik.

Alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat rentan untuk dimanipulas. Sehingga keaslian alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat penting dalam pembuktian. Menurut Anugrah,⁷ keabsahan dari alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik masih sangat diperlukan pembuktian lebih lanjut. Pembuktian ini terkait erat dengan originalitas alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik. Mengingat penilaian keabsahan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat sulit, karena jangan sampai keberadaan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik merugikan orang lain. Selain masalah originalitas dari suatu alat bukti informasi elektronik, dan dokumen elektronik dalam menjadikan suatu data atau dokumen sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana adalah masalah pengambilan data yang bisa dijadikan alat bukti. Karena dalam pengambilan alat bukti tidak mudah. Alasan kedua, karena sampai saat ini belum ada *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pengambilan alat bukti elektronik. Padahal mengingat kasus-kasus yang bersinggungan dengan *cyberspace* dan elektronik sudah berkembang. Mengingat yang bertugas untuk mengumpulkan alat bukti adalah penyidik, sehingga diperlukan dengan segera SOP dari penyidik kaitannya dengan pengambilan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik.⁸

Jika menelaah kasus-kasus yang sudah ada, misalnya berkaitan dengan status seseorang dalam media sosial. Dalam media sosial ada resiko yang harus dihadapi. Mengingat media

sosial adalah ruangan publik sehingga dalam pengambilan segala sesuatu tidak diperlukan izin tertentu karena sifat public tadi, siapapun bisa mengksesnya. Berbeda dengan *e-mail*, diperlukan izin untuk mengakses data tersebut. Cara mudah yang bisa ditempuh oleh penyidik yaitu dengan meminta izin pada pemilik *account* tersebut. Selain itu ada langkah lain bisa ditempuh yaitu melalui penyedia layanan. Karena pada dasarnya ada perjanjian antara penyedia layanan dan konsumen atau yang dikenal dengan *End User License Agreement* (EULA). Dalam perjanjian itu ada klausula yang menyebutkan seandainya konsumen melakukan pelanggaran hukum atau tindakan yang bertentangan dengan aturan maka penyedia layanan boleh menerobos masuk ke *account* tersebut.⁹

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal kekuatan pembuktian, hakim memiliki peranan penting dalam menilai kekuatan dari alat bukti informasi elektronik. Meskipun telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pembuktian pidana tidak mengenal hierarki alat bukti atau pembuktian bebas. Hakim memiliki hak untuk menilai alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Hakim terikat dengan minimum pembuktian yaitu dalam menjatuhkan putusan hakim harus berdasarkan 2 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP. Sehingga keberadaan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik memiliki peranan penting dalam pembuktian suatu perkara pidana.

D. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan alat bukti informasi

⁶ *Ibid.*

⁷ Hasil Wawancara dengan Anugrah Aditya selaku Dosen Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada Hari Senin, Tanggal 17 April 2014.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian perkara pidana sebelum UU ITE disahkan sudah jauh dikenal dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. . Menurut UU Dokumen Perusahaan alat bukti dokumen elektronik merupakan bagian dari alat bukti surat, sedangkan dalam UU Tipikor secara tegas menjelaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk. Pendapat dari para narasumber yang Peneliti wawancara terdapat perbedaan pandangan mengenai kedudukan dari alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya. Menurut Eddy O.S. Hiariej, alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya berdasarkan UU

ITE tidak boleh diperdebatkan lagi mengenai kedudukannya. Kedudukan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti berdasarkan 184 KUHP. Dalam arti menambahkan lima (5) alat bukti yang sudah ada dalam 184 KUHP menjadi 6 alat bukti baru dalam pembuktian perkara pidana yaitu (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; (e) keterangan terdakwa; dan (f) informasi elektronik, dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya. Sedangkan perbedaan pendapat dengan Anugrah Anditya, menurutnya diperlukan pemahaman dari penegak hukum untuk menelaah substansi dari alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik. Jika substansi dari alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik berisi surat sebagaimana pengertian surat maka informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti surat. Akan tetapi jika substansinya berisi sebuah petunjuk misalnya gambar, video audio visual, maupun CCTV maka ini hanya bisa dijadikan perluasan alat bukti petunjuk. Sekalipun informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut di print out tetap merupakan perluasan alat bukti petunjuk.

2. Dalam hukum acara pidana tidak mengenal adanya hierarki alat bukti. Sehingga tidak mengenal alat bukti yang lebih tinggi atau lebih kuat dalam perkara pidana. Karena pada hakikatnya dalam pembuktian perkara pidana dikenal pembuktian bebas. Akan tetapi pada perkembangannya alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik harus

dipertimbangkan dalam membuat terang suatu perkara pidana. Kesadaran dan pemahaman hukum dari penegak hukum akan keberadaan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia saat ini. Jangan sampai informasi elektronik dan dokumen elektronik hanya dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan. Di lain sisi keberadaan informasi elektronik dan dokumen elektronik juga masih sangat memerlukan syarat jika ingin

dijadikan alat bukti dalam persidangan yaitu (a) originalitas/keotentikan alat bukti; (b) substansi dari alat bukti; dan (c) kesesuaian alat bukti dengan alat bukti yang lain. Mengenai penilaian informasi elektronik dan dokumen elektronik masih sangat sulit karena mengingat informasi elektronik rentan dimanipulasi sehingga keberadaan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik masih sangat diperlukan pembuktian lagi dalam prakteknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Tahir, Ach, 2010, *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi dan Penanggulangannya)*, Suka Press, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284).

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406).
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599).

C. Sumber Lain

Wawancara dengan Eddy O.S. Hiariej selaku Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada Hari Senin, Tanggal 17 April 2014.

Wawancara dengan Anugrah Aditya selaku Dosen Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada Hari Senin, Tanggal 17 April 2014.